

Mengawal *Sustainable Development Goals*(SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan

Muhammad Fardan Ngoyo
Peneliti Ekonomi Politik di Pusat
Dokumentasi Sosial Ekonomi
carabaca

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pada proses pembangunan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan lain tentang orientasi pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dalam rangka memenuhi kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Meluruskan orientasi tersebut dalam rangka mengawal pembangunan berkelanjutan agar lebih adil dan demokratis. Selama ini orientasi pembangunan hanya diarahkan untuk meraih tingkat PDB atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Orientasi tersebut mengacu kepada 17 tujuan dalam kerangka SDGs yang telah diadaptasi oleh negara anggota PBB hingga tahun 2030. Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan maka partisipasi masyarakat sipil harus diberikan secara lebih terbuka. Salah satunya dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) sehingga dapat menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals* (SDGs), orientasi pembangunan, partisipasi, dan masyarakat sipil.

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Dalam konteks pembangunan ekonomi, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, bila melihat secara umum, potensi sumber alam negeri ini yang meliputi bidang agraris dan maritim Indonesia boleh dikatakan sebagai negeri yang kaya raya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masih jauh dibawah negara-negara maju.

Hutan tropis (*tropical rain forest*) Indonesia adalah terluas kedua di dunia. Hutan yang diperkirakan luasnya mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia (Kantor MENLH, 1990; Nurjaya, 1993). Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terkaya di dunia, yang meliputi 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tumbuhan tropis (More, 1994). Garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia (Choi & Hutagalung, 1998). Demikian pula, sumber daya mineral yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dll.

Merupakan kekayaan alam bumi Nusantara (Kantor MENLH, 2000; Bachriadi, 1998).¹ Namun, ada apa dengan kondisi perekonomian negeri ini, sehingga dalam laporan ketimpangan yang dirilis oleh INFID tahun 2014 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3%. Namun, di saat bersamaan laju ketimpangan kian pesat. Berdasarkan laporan tersebut, setidaknya ada tujuh trend ketimpangan yang sangat memprihatinkan dan wajib menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK untuk menanganinya pada lima tahun ke depan. Ketujuh trend tersebut adalah (i) ketimpangan kesempatan kerja; (ii) ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan; (iii) pelayanan kesehatan; (iv) pelayanan air bersih; (v) tingkat harapan hidup; (vi) indeks pembangunan manusia; (vii) kesenjangan pendapatan antara level pekerja dan CEO.²

Seperti yang diungkapkan oleh Adi Sasono dalam salah satu bukunya, bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, telah menghasilkan pertumbuhan tinggi untuk sekelompok kecil orang, kemiskinan untuk banyak orang, dan ketergantungan asing untuk seluruh masyarakat. Pertumbuhan tinggi yang dinikmati sekelompok kecil orang, tatkala 40 orang terkaya Indonesia menguasai 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) kita, merupakan pertumbuhan dengan tingkat pemusatan aset produktif dan kekayaan yang sangat tinggi.³ Secara makro dengan kondisi perekonomian seperti yang digambarkan di atas merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dimana ketimpangan sudah secara terang benderang terlihat dalam kehidupan keseharian kita sebagai bangsa.

Dengan melihat realitas sosial yang semakin timpang tersebut, juga memancing seorang budayawan, Radar Panca Dahana untuk menginterupsi pandangan kolektif kita yang semakin tergerus oleh pembangunan ekonomi dan mengikis sendi kehidupan kita khususnya rasa kemanusiaan dan kebudayaan. Lewat jalan kebudayaan, Radar dalam bukunya 'Ekonomi Cukup; Kritik Budaya dalam Kapitalisme' mengkritik cara pandang hidup yang ia sebut dengan "Budaya Hidup Lebih". Budaya hidup lebih ini adalah satu cara memandang dan melakoni hidup dengan sebuah nilai dasar dimana kita berhak bahkan wajib memperoleh atau berusaha mendapat lebih dari apa yang telah kita miliki. Untuk itu kita — seolah— wajib untuk berjuang keras, berkompetisi, bahkan jika perlu menggunakan semua cara, antara lain dengan menyikuk atau menghabisi para pesaing kita. Nilai itu kemudian secara normatif dianggap sebagai landasan dari "hak" yang individual, yang asasi.⁴

Lanjut Radar, cara berpikir ini secara imperatif meminta siapapun (manusia) untuk selalu progresif, dengan orientasi positif yang berarti ke depan, pada kemajuan, pada pertumbuhan atau pada pembangunan. Sebuah negara secara imperatif dituntut untuk mencatat pertumbuhan setiap tahunnya, setiap usaha/bisnis harus membukukan pertambahan profit setiap tahunnya, hidup manusia pun diukur dari pertambahan fasilitas hidup yang dimilikinya.⁵ Nah, budaya hidup lebih ini ternyata tidak hanya menggerogoti cara pandang pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan. Namun, juga sudah mulai dijadikan sebagai tolok ukur hidup bagi sebagian masyarakat kita. Makanya, potret ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan masih menjadi masalah klasik yang mendera bangsa ini. Sehingga, potrer pembangunan yang sedemikian megah nan mewah sebagai potret kemajuan yang ditunjukkan oleh beberapa kota-kota besar di Indonesia kini sangat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat dan alam sekitar. Maka tak heran pula bila Paus Fransiskus mengecam ketimpangan sebagai 'akar dari kejahatan'.

Selain itu, sumbangan ketimpangan ekonomi dan cara pandang pembangunan yang sangat dominan terhadap lingkungan alam menyumbangkan kerugian bagi degradasi kualitas lingkungan. Usaha-usaha mengejar pertumbuhan selalu didorong oleh motivasi untuk investasi, produksi dan konsumsi. Lingkaran kegiatan ini memberikan kontribusi

¹Dr. I Nyoman Nurjana, SH MH. *Menuju Pengelolaan Sumber Daya Agraria yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan: Perspektif Hukum dan Kebijakan*. Hal 1.

²Sugenk Bahagjo dkk. *Trend Ketimpangan dan Pilihan Kebijakan Indonesia, Laporan Ketimpangan di Indonesia 2014*. (INFID, 2015), h. xii.

³Adi Sasono, *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri;Pergulatan Kerakyatan, Kemartabatan, dan Kemandirian* (Jakarta: Grafindo Booksmidia,2013), h.9.

⁴Radar Panca dahana, *Ekonomi Cukup; Kritik Budaya pada Kapitalisme* (Jakarta:Penerbit Kompas,2015), h.157.

⁵Ibid, h.157.

besar bagi menurunnya kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan menciptakan dua persoalan, yakni mengecilnya sumber daya alam dan pencemaran.⁶ Hal tersebut merupakan masalah ketidakseimbangan dalam memandang relasi antara alam dan manusia yang secara teoritik menjadi bahan kritik dari Saras Dewi dalam *Ekofenomenologi; Mengurai disequilibrium antara relasi Manusia dan Alam*. Dalam buku tersebut banyak membahas tentang bagaimana melihat hubungan ontologis antara manusia dan alam dengan melandaskan perspektif fenomenologi dari berbagai pemikir filsafat. Lewat fenomenologi lingkungan, berupaya memahami ekosistem sebagai fenomena, bukan sebagai objek yang terlepas dari subjek, tetapi fenomena mensyaratkan adanya intensionalitas antara subjek dengan objeknya. Metode fenomenologi lingkungan menunjukkan realisasi dimensi ontologis hubungan manusia dan alam menjadi fundamental sebagai upaya memecahkan problem disequilibrium yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ontologi adalah akar bagi segala bentuk perbaikan sistem politik, sosial, maupun ekonomi menyangkut alam.⁷

Nah, praktik pembangunan yang berorientasi pertumbuhan tersebut sudah mulai menunjukkan krisis. Setidaknya selama memasuki bulan September 2015 ini, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan hingga mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 14.000. Tentunya hal tersebut berdampak turunan secara sistemik oleh seluruh lapisan masyarakat yang merasakan naiknya biaya hidup yang semakin menghimpit. Belum lagi degradasi kualitas lingkungan yang dihasilkan dari bencana kabut asap yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di tahun 2013, 117 perusahaan di Riau dilaporkan ke KLH karena diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut, 8 perusahaan diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Di tahun 2014, beberapa perusahaan tersebut kembali menjadi tersangka pembakar hutan dan gambut atas laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Di tahun 2014, BP REDD+ dan UKP4 telah melakukan audit kepatutan perusahaan dan hasilnya menunjukkan beberapa perusahaan tidak memenuhi kepatutan dalam pengelolaan izin di kawasan hutan dan gambut, termasuk perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka.⁸ Bila masih mempercayakan basis pertumbuhan ekonomi negeri pada korporasi-korporasi yang mengelola sumber alam tersebut, maka kita masih akan mengalami bencana-bencana sosial lain yang ongkos sosial dan lingkungannya tidak murah. Sementara perusahaan tersebut mengeruk kekayaan alam tersebut dengan sumbangan yang tidak seberapa besarnya bagi negara dan masyarakat, disisi lain dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut ternyata lebih banyak merugikan kepentingan kolektif masyarakat. Hingga kini, ancaman kabut asap seakan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang ada di Sumatera.

Sehingga dalam pengakuan bandit Ekonomi, Perkins mengemukakan bahwa statistik pertumbuhan ekonomi dan GDP yang luar biasa tidak sebanding dengan ongkos yang harus dibayar.⁹ Beranjak dari berbagai perspektif di atas, pembangunan jelas bukan berarti sebagai usaha pertumbuhan ekonomi *an sich*. Persoalan pokok yang perlu ditanggapi adalah meluruskan orientasi pembangunan yang di satu pihak menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan di pihak lain, juga mampu menanggulangi persoalan-persoalan dasar masyarakat. Sehingga dengan perspektif tersebut mampu mereduksi berbagai ketimpangan sosial yang terjadi dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok kecil masyarakat. Selain itu, Indonesia yang sedang mengalami bonus demografi memiliki angkatan muda yang sangat berlimpah. Hal tersebut merupakan potensi besar yang mesti dikembangkan. Namun, partisipasi kaum muda dalam isu-isu pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan masih sedemikian rendah. Untuk memperkuat tercapainya upaya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maka penting untuk mendorong partisipasi yang luas dari berbagai pihak khususnya kaum muda.

⁶ Budi Winarno, *Etika Pembangunan* (Jakarta; CAPS, 2013), h.320.

⁷ Saras Dewi, *Ekofenomenologi; Mengurai disequilibrium relasi manusia dengan alam*. (Tangerang; Marjin Kiri, 2015), h. 148.

⁸ <http://www.walhi.or.id/kunjungan-blusukan-ke-lokasi-kebakaran-hutan-riau.html> diakses terakhir pada tanggal 26 September 2015.

⁹ John Perkins dalam Budi Winarno, *Etika Pembangunan* (Jakarta; CAPS, 2013), h.105.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah disebutkan dan digambarkan di atas, ada beberapa hal pokok masalah yang penting untuk kita catat dan garis bawahi agar potret pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah orientasi pembangunan yang telah dan sedang diterapkan dalam membangun perekonomian bangsa hari ini telah berdampak secara struktural maupun kultural pada aspek ekonomi, sosial-budaya, hingga lingkungan. Ketiga aspek tersebut memperlihatkan ketimpangan semakin lebar di tengah ambisi pemerintah dalam menjaga trend pertumbuhan ekonomi yang menafikan aspek-aspek lain yang tak kalah pentingnya dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pokok permasalahandalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana konsep *Sustainable Development Goals* dalam pembangunan Indonesia ?
2. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan hidup ?
3. Bagaimana peran partisipatif berbagai pihak (*stakeholders*) dalam pembangunan berkelanjutan ?

C. Tujuan dan Manfaat

Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan. Hal ini juga mencakup apa saja yang dapat dilakukan dalam menjawab problem kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi bagaimana partisipasi berbagai pihak khususnya kaum muda dapat berperan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, manfaat dari tulisan ini yakni, memberikan kerangka teoretis dalam meluruskan orientasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah khususnya dari aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Selain itu, juga dapat memberikan masukan bagi arah kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah agar lebih adil dan berorientasi pada keberlanjutan.

II. Kajian Teoretis

A. Mengukur Kesejahteraan

Seperti yang telah dikemukakan di awal pembahasan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata meninyisahkan sejuta pertanyaan dan permasalahan. Hal tersebut membuat kita berupaya mempelajari kembali apa yang seharusnya kita telaah dalam persoalan pembangunan. Apakah hanya dengan aktivitas ekonomi yang terus menerus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi '*pro growth*' yang kita kejar. Sementara di sisi lain, pertumbuhan tersebut dalam tataran realitas sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan yang sesungguhnya di masyarakat.

Sudah sejak lama pengukuran kinerja perekonomian suatu negara diukur dengan kerangka statistik yang mengukur tingkat kemakmuran dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pengukuran tersebut yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan pengukuran aktivitas ekonomi yang paling banyak dipakai. Dalam pengukuran PDB suatu negara hal-hal yang diukur adalah melalui pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Oleh karena itu, melalui buku 'Mengukur Kesejahteraan; Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan?' ekonom Joseph. Stiglitz, Amartya Sen, dan Paul Fitoussi menggugat dengan kritik tajam pada cara pandang dalam melihat persoalan pengukuran kinerja ekonomi. Khususnya dalam hal kualitas hidup, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas lingkungan yang banyak diabaikan dalam pengukuran-pengukuran konvensional.

Setidaknya dalam pengukuran yang dilakukan oleh ketiga ekonomi tersebut memberikan perspektif baru dalam melihat kondisi objektif pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara makro maupun mikro. Ukuran-ukuran yang lebih relevan dapat menjadi

acuan dan landasan dalam menyusun berbagai keputusan-keputusan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengukur kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup, maka kita akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai ukuran-ukuran pertumbuhan dan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. Ada tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup yakni, pendekatan pertama dikembangkan erat kaitannya dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang kesejahteraan subjektif. Pendekatan kedua, berakar pada gagasan tentang kapabilitas. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara berbagai “kegiatan dan kedirian” (*functionings*) dan kebebasannya untuk memilih diantara fungsi-fungsi tersebut (*capabilities*). Pendekatan ketiga, yang dikembangkan dalam tradisi ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil. Dasar pemikirannya, yang banyak ditemui dalam ilmu ekonomi kesejahteraan, adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferensi seseorang.¹⁰

Dalam mengukur kualitas hidup, memasukkan unsur kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, ketidakamanan pribadi, ketidakamanan ekonomi. Kemudian ditambah lagi mengukur kualitas lingkungan hidup yang terkena dampak dalam aktivitas-aktivitas ekonomi produktif sehingga bisa saja menambah ongkos sosial ekonomi bila terjadi kerusakan yang parah.

B. Konsep *Sustainable Development Goals*

Wacana pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan isu yang baru terdengar. Jika menelaah siklus investasi, produksi, dan konsumsi yang berlangsung dan dilakukan dalam skala besar maka jangka panjangnya akan menimbulkan pertanyaan besar bagi kelangsungan alam dan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, gagasan pembangunan berkelanjutan ini muncul dan menjadi pendekatan yang disarankan.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan *the World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak definisi dan konsep itupun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. *Pertama*, komitmen pada keadilan dan *fairness*, dimana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang. *Kedua*, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip precautionary, yaitu, “dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seyogyanya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan”. *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.¹¹

Atas dasar tersebutlah kemudian melandasi sebuah upaya untuk membangun sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB. Pada tahun 2000, secara resmi digagas *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

¹⁰Joseph E Stiglitz Dkk. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat menilai kemajuan?*. (Tangerang; Marjin Kiri, 2011), h. 70-71.

¹¹*Ibid* .h. 154-155.

- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. *Kedua*, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. *Ketiga*, tujuan, target, dan indikator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. *Keempat*, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs.¹²

Nah, setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030, diantara target tersebut yakni :

- 1) *End poverty in all its forms everywhere;*
- 2) *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture;*
- 3) *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages;*
- 4) *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all;*
- 5) *Achieve gender equality and empower all women and girls;*
- 6) *Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all;*
- 7) *Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*
- 8) *Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all;*
- 9) *Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation;*
- 10) *Reduce inequality within and among countries;*
- 11) *Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable;*
- 12) *Ensure sustainable consumption and production patterns;*
- 13) *Take urgent action to combat climate change and its impacts;*
- 14) *Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development;*
- 15) *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss;*
- 16) *Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels;*
- 17) *Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.*¹³

¹²Hamong Santono dan Sugeng Bahagijo, *Pembangunan Global Baru: Perkembangan Penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-2015*. (INFID, 2015), h.10.

¹³ Open Working Group proposal for Sustainable Development.pdf

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

C. Pendekatan Pembangunan

Bila mengacu kepada pengalaman pelaksanaan MDGs yang telah berakhir pada 2015 ini, proses pembangunan yang disusun dengan target dan tujuan yang jelas belumlah dapat mencerminkan terlaksananya pembangunan berkelanjutan dengan catatan partisipasi masyarakat terkait hal tersebut masih minim. Dalam pendekatan pembangunan, ada baiknya kita menelisik lebih jauh mengenai proses-proses keterlibatan subjek pembangunan dalam rangka partisipasi yang lebih luas. Indikator keberhasilan hanya mungkin dicapai melalui hasil kerjasama dari berbagai pihak yang secara terbuka aktif terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Salah satu pendekatan yang menurut penulis dapat diadaptasi adalah pendekatan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Mengingat kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan MDGs yang bersifat 'top down' olehnya itu menjadi penting memulai proses pembangunan dengan melibatkan diri dengan subjek 'dari bawah' melalui partisipasi. PRA sendiri merupakan pendekatan yang diadopsi dan dipopulerkan oleh Robert Chambers. Yang menjadi inti dari pendekatan partisipatoris Chambers ialah ide bahwa kesenjangan antara asumsi-asumsi dasar dari para peneliti dan kebutuhan-kebutuhan riil mereka yang membutuhkan bisa diatasi dengan menciptakan kondisi-kondisi yang didalamnya objek-objek dari penelitian pembangunan dan/atau objek-objek dari pembangunan akan bisa memberikan sumbangan yang lebih aktif terhadap sasaran-sasaran dan secara ideal mendefinisikan tujuan-tujuan dari pembangunan dan penelitian pembangunan. Inti dari PRA ialah ide bahwa dengan mengubah asumsi-asumsi dan praktek dari penelitian pembangunan dan proyek-proyek pembangunan, para peneliti dan profesional pembangunan bisa menciptakan bagi masyarakat miskin suatu kesempatan yang lebih bermakna untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan dan mengarahkan penelitian pembangunan.¹⁴

Untuk tujuan tersebut, Chambers lanjutnya, mengusulkan berbagai strategi yang akan (secara ideal) menyingkirkan atau mengurangi; (1) ketidakseimbangan kekuasaan antara objek-objek dari penelitian sosial; (2) bias-bias dari pengalaman akademik, perkotaan, kosmopolitan, dan 'modern' yang peneliti bawah dalam proses penelitian mereka.¹⁵ Termasuk dalam hal ini, dalam pelaksanaan SDGs nantinya pelibatan masyarakat secara partisipatif akan mendorong masyarakat tidak hanya mengkaji melainkan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan sejak mulai mengenal kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai mengevaluasi kegiatan.

Strategi tersebut ialah pengukuran-pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan yang menggantikan dan melengkapi :

- Kuisisioner-kuisisioner yang telah dibuat sebelumnya dengan olah pemeringkatan yang partisipatoris, yang melibatkan diagram-diagram batang, pemetaan sosial dsb;
- Survei-survei rumah tangga yang baku dengan suatu observasi partisipatoris dimana para peneliti secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas tenaga kerja atau kehidupan lainnya dari kaum miskin;
- Wawancara-wawancara secara terisolasi dan artifisial dengan diskusi –diskusi kelompok terfokus, yang memberikan ruang bagi berbagai isu potensial, memberikan kepada responden individual kesempatan untuk membuat suara mereka didengar.¹⁶

Sedangkan pendekatan lain yang menyerupai dan dapat digunakan dalam model pembangunan berkelanjutan adalah *Sustainable Livelihood Approach* (SLA). SLA mengakui

¹⁴Craig Johnson. *Pembangunan Tanpa Teori; Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Resist Book, 2012), h.270.

¹⁵Ibid, h. 271

¹⁶Ibid, h 271

arti pentingnya kerentanan struktural, pengambilan keputusan oleh rumah tangga dan dampak dari ekonomi mikro terhadap proses-proses ekonomi makro dan 'even-even istimewa'. Kutipan berikut dari tulisan Chambers dan Conway (1991) menyajikan basis konseptual bagi SLA :

"Suatu penghidupan (*livelihood*) terdiri atas kapabilitas-kapabilitas, aset-aset, dan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Suatu penghidupan tersebut berkelanjutan manakala bisa menghadapi dan memulihkan diri dari tekanan dan kejutan, mempertahankan atau meningkatkan kapabilitas dan aset-aset, sambil tidak menggerogoti basis sumber daya alamnya"¹⁷

Yang menjadi dasar dari SLA ialah asumsi bahwa metodologi-metodologi penelitian partisipatoris bisa menghasilkan tilikan-tilikan yang lebih akurat mengenai realitas lokal yang pada gilirannya akan memberikan dasar informasi buat kebijakan yang lebih baik.¹⁸ Paling tidak melalui pendekatan pembangunan SLA dapat memberikan informasi kunci bagi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang sangat membutuhkan informasi yang relevan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

III. Pembahasan

A. Adopsi dalam Peraturan Pemerintah

Pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam 17 tujuan SDGs yang akan berlaku hingga 2030 merupakan masih sebatas dokumen yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dijalankan dalam pembangunan di Indoensia. Oleh karena itu, agar percepatan pembangunan tersebut dapat memberi efek sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan maka mesti mengadopsi konsep SDGs ke dalam peraturan pemerintah.

Agar tidak mengulangi tidak tercapainya hasil seperti MDGs yang masih jauh dari harapan dan masih menuai kritikan. Maka hal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan berbagai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, skala makro tujuan dan target pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan dalam RPJMN dan peraturan pemerintah agar mendukung legitimasi implementasi SDGs. Sehingga program kerja lintas sektor dapat mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari '*political will*' pemerintah dalam berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah menunjukkan *political will* yang kuat, maka saatnya lah pemerintah merangkul berbagai pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana prinsipnya 'no one leave behind'. Prinsip tersebut sangat penting dipegang agar tidak ada kesan ego-sektoral yang lebih dominan dalam proses pembangunan yang akan menafikan kontribusi sektor lainnya.

B. Keterlibatan Masyarakat Sipil

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, boleh dikatakan negara memegang peranan penting sebagai aktor kunci dari keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Sebagaimana dalam penjelasan mengenai PRA dan SLA yang menekankan partisipasi masyarakat dalam menggunakan kapabilitasnya dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal SDGs dapat ditempuh melalui model pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up*). Hal ini dapat digunakan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada basis modal sumber

¹⁷Chambers dan Conway dalam *Craig Johnson. Pembangunan Tanpa Teori* h. 172

¹⁸Ibid, h. 173

daya alam. Dengan menggunakan modal pendekatan PRA dan SLA peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di pesisir dan pedesaan dapat dilakukan sendiri atas inisiatif dan partisipasi masyarakat sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita adalah negara agraris dan maritim, maka sektor ini penting diberikan perhatian dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, melalui pendekatan partisipatif tersebut, dapat menggali kembali kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah tertanam sebagai nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga jangan sampai tergerus oleh pandangan hidup yang individualistik dan kapitalistik yang sudah mulai menggerogoti sendi kehidupan masyarakat. Menggali kembali kearifan-kearifan lokal dalam wujud keloktifisme dalam kehidupan masyarakat dan relasi dengan alam sekitar merupakan salah satu langkah jitu untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dapat terwujud dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat sipil juga diharapkan dari organisasi masyarakat sipil (NGO) dalam mengontrol dan memberikan masukan-masukan konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. NGO yang bergerak dalam berbagai sektor dan isu-isu sektoral dapat bekerjasama dan bersatu padu dalam memberikan sumbangsih dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut. NGO yang bergerak di bidang lingkungan, kebudayaan, kebijakan publik, pemberantasan korupsi, keadilan gender, keadilan agraria mesti membangun jejaring yang kuat dalam menyokong suksesnya program dan target pembangunan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Ungkapan '*think global act locally*' nampaknya sangat kontekstual dan dapat menjadi kampanye positif bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dimana tindakan-tindakan lokalitas yang berlandaskan pada kearifan lokal tanpa disadari secara tidak langsung akan berdampak secara global bagi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dukungan keterlibatan lainnya bagi pembangunan berkelanjutan adalah dapat didorong oleh keterlibatan kaum muda dalam proses-proses pembangunan dengan melibatkan mereka secara aktif. Upaya itu dapat dimungkinkan dengan memberikan akses pendidikan yang merata bagi kaum muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang pengetahuan. Hingga kini, akses pendidikan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia.

Kalau kita melihat gairah anak muda dalam berpartisipasi dalam gerakan sosial kemasyarakatan terlihat sangat antusias. Seperti yang terlihat di kota kelahiran saya, Makassar. Di sana gairah anak muda dalam mengembangkan potensinya melalui komunitas-komunitas kreatif semakin tinggi. Munculnya komunitas literasi yang berada di berbagai kampus. Hingga keterlibatan aktif kaum muda dalam isu-isu kebijakan publik yang menyangkut lingkungan, sosial-budaya dll. Hal ini merupakan potensi yang harus dijaga dalam proses pembangunan, meski tingkat ketimpangan di perkotaan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, kehadiran SDGs dapat mendorong keterlibatan kaum muda secara lebih aktif dalam isu-isu pembangunan. Tujuan pembangunan yang menyentuh aspek pendidikan, ketimpangan, kemiskinan, kesehatan, ruang publik dapat memberikan kesempatan bagi kaum muda agar dapat mempunyai ruang yang kondusif dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya dan secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Paling tidak dengan program pemberdayaan kaum muda melalui industri kreatif dan komunitas-komunitas yang ditekuninya dapat menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah secara ekonomis di sektor-sektor informal perkotaan.

C. Akses Infrastruktur dan Jaminan Sosial

Infrastruktur merupakan salah satu modal sosial yang memberikan masyarakat kemudahan-kemudahan dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Salah satu tujuan dan target dari SDGs adalah pembangunan infrastruktur. Akses infrastruktur dalam pembangunan masih terlihat ketimpangan yang lebar. Dimana masih banyak wilayah di Indonesia yang terisolir karena keterbatasan akses. Karena keterbatasan tersebutlah menjadi penghambat bagi percepatan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan beberapa wilayah di Indonesia. Pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh akses bagi percepatan arus modal yang justru menyumbangkan kondisi ketimpangan bagi masyarakat.

Di sisi yang lain, kondisi yang masih perlu dibenahi pula adalah pemenuhan jaminan sosial yang bagi sebagian masyarakat miskin yang masih sulit mendapatkan akses kesehatan yang layak. Sehingga beberapa wilayah di Indonesia angka harapan hidup berada di bawah rata-rata nasional. Maka dari itu peningkatan sarana dan sumber daya kesehatan mesti ditingkatkan agar taraf hidup kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

D. Penguatan Kelembagaan

Sebelum pelaksanaan sebuah proses pembangunan hal yang harus diperhatikan untuk mendukung berjalannya proses sesuai dengan target maka yang mesti diperkuat adalah aspek kelembagaan. Oleh karena itu, perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa pemerintah perlu membentuk sekretariat bersama untuk menampung seluruh aspirasi dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam implementasi SDGs. Dengan memperkuat aspek kelembagaan dalam mengawal implementasi SDGs maka berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan. Selain melalui sekretariat bersama, penguatan kelembagaan juga harus diterapkan kepada seluruh bidang pemerintahan yang ada. Sehingga kerjasama berbagai sektor bidang dalam pembangunan dapat berkontribusi dengan baik.

IV. Kesimpulan

Cita-cita negara yang telah digagas oleh para '*founding fathers*' bangsa sebagaimana yang termaktub dalam amanat pembukaan UUD 1945 yakni, ".....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Hal ini menunjukkan bahwa rakyat juga merupakan pemilik sah republik ini. Oleh karena itu, penting kiranya posisi rakyat diberikan tempat dan kehormatan yang tinggi dalam sebuah proses pembangunan. Rakyat tidak boleh lagi dianggap hanya sebagai 'penduduk' secara administratif namun sebagai 'warga negara' yang memiliki seperangkat hak-hak dasar sebagai bagian dari republik ini.

Maka dari itu seyogyanya, bila rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki seperangkat hak yang harus dipenuhi dan diberikan kuasa untuk memikirkan, menyusun, merencanakan, dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai target dan tujuan dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang *taken for granted* yang serta merta harus diikuti tanpa pernah memikirkan bagaimana dampak dan kontribusinya bagi rakyat banyak. Pada intinya proses pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada tiga komponen yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi yang saling terhubung. Tercapainya tujuan dan target SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah. Selain itu, upaya serius dari pemerintah belumlah cukup bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang menyokong terlaksananya tujuan tersebut. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil (NGO), masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang. (*)

Daftar Pustaka

- Dahana, Radar Panca. (2015). *Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme*. Kompas; Jakarta.
- Dewi, Saras. (2014). *Ekofenomenologi; Mengurai disequilibrium relasi manusia dan dengan alam*. Marjin Kiri; Tangerang.
- Johnson, Craig. (2013). *Pembangunan Tanpa Teori; Kuasa Pengetahuan dan Perubahan Sosial*. Resist Book; Yogyakarta.
- Sasono, Adi. (2011) *Menjadi Tuan di Negeri Sendiri; Pergulatan Kerakyatan, kemartabatan, dan Kemandirian*. Grafindo Books; Jakarta.
- Stiglitz. J, Dkk. (2011). *Mengukur Kesejahteraan; mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan ?*. Marjin Kiri; Tangerang.
- Winarno, Budi. (2013). *Etika Pembangunan*. CAPS; Yogyakarta.

